

PENGARUH SISTEM POLITIK MASYARAKAT JAWA TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA

**Agung Ariyanto, Dio Dera Darmawan, Ganang Setiyo
Nugroho**

Abstract

In the midst of the multicultural reality of Indonesia, the existence of the Javanese community can quite exist in Indonesian society. This can be seen in the fact that most of the population is Javanese society, and in their development in the sense of having spread wander down to the outposts the country, until it can be said that the Java community has ebar ters throughout Indonesia.

The goal in this article is to know how the political system in the Java community can influence the political system in Indonesia is in the midst of a multicultural Indonesia. The method used to compile this article is the study of literature as well as to observe political and birocration system at this time.

The results of this study concluded that directly or indirectly affect the condition of the political system of Indonesia. The political system in the Java community, recognized or not, in fact it has become a standard patern as an overview of Indonesia's current political system. As the dominant tribe, tribal political system currently has more or less successfully Java infiltrated various political systems of other tribes in Indonesia, although in modern bureaucratic agency level, not at the level of the political system of tribal customs is concerned.

Keywords: *influence, Indonesia political system, and Javanes Culture.*

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaannya sendiri, yang telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi dianggap sebagai suatu keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Konsep multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat di Indonesia, seperti bahasa, religi, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem politik, dan lain sebagainya, yang membentuk terwujudnya masyarakat.

Sampai saat ini terdapat banyak pandangan dalam mengonsepan budaya, sehingga wajar saja terdapat beragam konsep tentang budaya. Menurut pandangan holistis, budaya dikonsepan secara luas, meliputi tiga basis, yaitu: (i) lapis dan basis material yang membentuk sistem material budaya; (ii) lapis dan basis sosial yang membentuk sistem sosial budaya; dan (iii) lapis dan basis mental kognitif yang membentuk sistem lambang budaya yang bersifat intersubjektif.¹

Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat, merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam cakupan yang lebih luas hal ini, sistem politik melaksanakan perang atau mendorong perdamaian, memajukan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri, menarik pajak dari rakyat

¹ Harsya Bachtiar. *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia Indonesia.* (Yogyakarta, Hanindita, 1985), hlm. 66-67

secara adil atau tidak, mengalokasikan sumber daya untuk hajat hidup orang banyak. Singkatnya sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan.

Dalam konsep holistik, sistem politik tersebut berhubungan dengan lapis dan basis mental. Dalam konteks ini dapat dinyatakan bahwa sistem lambang yang bersangkutan dengan pengetahuan, gagasan-gagasan, serta nilai menempati lapis dan basis terdalam budaya. Hal ini mengimplikasikan bahwa budaya sebagai sistem lambang berhubungan dengan sistem-sistem lain, termasuk sistem politik.

Budaya politik menurut Almond dan Verba adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen komponennya, serta sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial, yang menyangkut sistem politik dan kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat cognitive, affective dan evaluative.²

Dalam berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia (multikultural), juga mengenal adanya sistem politik yang cenderung berbeda antar tiap suku bangsa. Secara tradisional telah dikenal konsep-konsep politik seperti untuk suku Jawa dalam serat Rama yang memuat Hastabrata dan Serat Suryaraja, Lontara Lagaligo untuk suku Bugis Makassar, Kitab Puspakerma bagi suku Sasak di Lombok, Adab Fata-A untuk suku Melayu. Bagi suku-suku yang tidak mengenal tulisan seperti suku Dayak di Kalimantan dan suku Baliem di Irian, biasanya pewarisan nilai-nilai budaya dilakukan secara lisan oleh ketua adat secara turun temurun.

Di tengah kenyataan multikultural bangsa Indonesia tersebut, keberadaan masyarakat Jawa dapat dikatakan cukup eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat

² Afan Gaffar. *Politik Indonesia*. (Yogyakarta, Pustaka Indonesia, 2000), Hlm.99

dilihat dalam kenyataan bahwa populasi paling besar merupakan masyarakat Jawa, dan dalam perkembangannya mereka mengalami persebaran dalam artian merantau hingga ke pelosok-pelosok negeri, hingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa sudah tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi sistem politik bangsa Indonesia.

Stereotip yang terdapat pada masyarakat Jawa, dimana kebanyakan masyarakat Jawa masih membedakan antara golongan priyayi dan orang kebanyakan atau wong cilik. Golongan priyayi atau bendara terdiri atas pegawai negeri dan kaum terpelajar. Orang kebanyakan disebut juga wong cilik, seperti petani, tukang, dan pekerja kasar lainnya. Priyayi dan bendara merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik menjadi lapisan bawah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai corak sistem politik yang terdapat pada masyarakat Jawa di tengah multikultural bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai batasan masalah dan tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem politik dalam masyarakat Jawa dapat mempengaruhi sistem politik di Indonesia di tengah kondisi Indonesia yang multikultural.

PEMBAHASAN

1. Stratifikasi dalam Sistem Politik Masyarakat Jawa

Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka ia akan bekerjasama untuk mencapai beberapa nilai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia lain,

pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Harold Laswell merinci terdapat delapan nilai, di antaranya adalah³ :

- a. Kekuasaan
- b. Kekayaan
- c. Penghormatan
- d. Kesehatan
- e. Kejujuran
- f. Keterampilan
- g. Pendidikan
- h. Kasih sayang

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam sikap bermasyarakat di antara manusia, masing-masing akan saling menghubungkan sikap, tingkah laku, dan perhatiannya, hubungan dimana akan terlaksana dalam suatu tatanan yang dipelihara atas dasar keinsyafan dan kesadaran bersama. Di dalam masyarakat setiap individu/orang akan mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada hakekatnya hak-hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dengan hak dan kewajiban tiap individu didalam masyarakatnya akan mendapatkan kedudukan atau posisi tertentu.⁴

Posisi atau kedudukan seseorang yang diperolehnya dalam masyarakat disebut status. Dalam masyarakat setiap orang akan memperoleh statusnya sendiri dimana status ini sering berbeda dengan status yang diperoleh orang lain. Dalam masyarakat jawa, masih membedakan antara golongan priyayi dan orang kebanyakan/kawula/wong cilik. Golongan priyayi atau bendara terdiri atas pegawai negeri dan kaum terpelajar. Orang kebanyakan disebut juga kawula/ wong

³ Harold D. Laswell. *Politic: Who Gets What, When, How*. (New York, Meridian Book, Inc, 1972), hlm.332

⁴ Sri Wiyarti. *Sosiologi*. (Surakarta, LPP UNS & UNS Press, 2008), hlm.120

cilik, seperti petani, tukang, dan pekerja kasar lainnya. Priyayi dan bendara merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik menjadi lapisan bawah. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen. Maka pembagian atau stratifikasi sosial tersebut, tentu akan berpengaruh dalam menguraikan model sistem politik pada masyarakat Jawa.⁵

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.⁶

Dalam masyarakat Jawa, Secara administratif, suatu desa di Jawa biasanya disebut kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, seorang kepala desa dengan semua pembantunya disebut pamong desa. Pamong desa mempunyai dua tugas pokok, yaitu tugas kesejahteraan desa dan tugas kepolisian untuk keamanan dan ketertiban desa. Adapun pembantu-pembantu lurah dipilih sendiri oleh lurah. Pembantu-pembantu lurah terdiri atas:

⁵<http://sugengcido.blogspot.com/2012/01/kebudayaan-sukujawa.html#ixzz2Evnp0dbE>, diakses pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 20.45 WIB).

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik , diakses pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 21.20 WIB

- a. Carik, bertugas sebagai pembantu umum dan penulis desa.
- b. Jawa tirta atau ulu-ulu, bertugas mengatur air kesawah-sawah penduduk.
- c. Jaga baya, bertugas menjaga keamanan desa.

Dalam bukunya, Kuntowijoyo memberikan gambaran lain mengenai sistem politik yang ada di Surakarta, khususnya di lingkungan Keraton Kasunanan. Dijelaskan bahwa secara garis besar terdapat tiga golongan priyayi di Surakarta. Priyayi *abdi dalem* raja, priyayi *abdi dalem* pemerintah (*ageng*) (institusi kerajaan, dibawah kuasa patih selaku kepala pemerintahan), dan priyayi terpelajar. Menjadi *abdi dalem* sudah menjadi cita-cita para anak priyayi sejak kecil. Sebelum mendapatkan status priyayinya, para putra *abdi dalem* yang akan meneruskan pekerjaan orang tuanya harus melewati beberapa tahapan. Tahapan itu dimulai dengan *suwita* (belajar) pada priyayi tinggi. Lalumagang (masa percobaan) dengan mengerjakan tugas-tugas sesuai profesi yang ingin ditekuni. Setelah itulah baru ia di-*wisuda* (pengukuhan) sebagai priyayi. Jenjang-jenjang ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara priyayi dan raja adalah hubungan *patron-client*.

Lebih jauh jenjang-jenjang ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia kepriyayian pun ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dijaga dan dilestarikan juga dalam simbol-simbol budaya. Simbol-simbol itu di antaranya adalah jumlah kewajiban sembah, pakaian, bahasa, dan tempat duduk kala beraudiensi dengan raja. Selain itu juga berkembang di kalangan priyayi tentang *world view* mereka yang secara ilmiah disebut *political mysticism*. Pandangan mistisme para priyayi ini berkaitan dengan panggilan jiwa mereka saat menjalankan amanah dari raja. Bagi para priyayi ini, kemuliaan karena berhasil menjalankan amanat raja adalah tujuan utama.

Kuntowijoyo juga menggambarkan mengenai PB X sebagai raja yang memiliki pribadi dengan *Emotional*

Intelligent (EI) yang tinggi. PB X tahu benar akan potensi yang dimilikinya. Dengan diperkuat tradisi kraton yang ketat, PB X lihai memainkan perannya sebagai seorang raja dan beliau sukses. Dalam folklore Jawa dikatakan bahwa Susuhunan PB X adalah raja Jawa terbesar yang telah menghabiskan kemuliaan, kemuktian, dan kewibawaan untuk dirinya sendiri, sehingga bahkan tak tersisa sedikitpun untuk raja-raja sesudahnya. Secara umum PB X dengan sukses telah memainkan simbol personal (kewenangan, titel, pakaian, penghormatan, anugerah, dan hedonisme) dan simbol publik (tradisi, nasionalitas, religiusitas, dan interkultural), serta kepribadiannya yang menonjol untuk mempertahankan eksistensinya sebagai raja.

Kawula memiliki jarak sosial-budaya yang jauh dengan raja dan priyayi. Jika dikatakan politik simbol amat memengaruhi hubungan raja dan priyayi, maka hal itu tidak lagi berlaku pada kawula. simbol-simbol kekuasaan telah melemah setelah melewati jarak sosial yang jauh. Kawula memiliki dan mengembangkan budayanya sendiri yang disebut sebagai budaya tandingan itu. Kawula punya simbol-simbolnya sendiri.⁷

Maka, dapat diambil kesimpulan melalui hubungan *patron-client* yang terbangun antara raja dan priyayi, adalah hal mudah bagi kita membuat kesimpulan bahwa keduanya adalah kaum superior. Sementara dalam anggapan mereka, rakyat atau *kawula* adalah para penonton saja. Kehidupan rakyat adalah kehidupan tersendiri yang terpisah dari jangkauan korelasi raja-priyayi.

2. Sistem Politik Masyarakat Jawa Dalam Perkembangan Sistem Birokrasi Indonesia

Akar budaya politik di Indonesia dipengaruhi oleh ideologi dan struktur perpolitikan penguasa, termasuk di

⁷ Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat, Edisi Paripurna*. (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006), hlm.66

dalamnya kerajaan-kerajaan, penguasa kolonial, dan penguasa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketiganya memberikan andil sebagai akar budaya politik, sehingga pada perkembangan selanjutnya sering muncul dalam dinamika perkembangan politik di Indonesia dan juga perkembangan perekonomiannya.

R.W. Liddle berpendapat, bahwa karakter Jawa mempengaruhi politik Indonesia pada era Orde baru, rezim yang berkuasa sekarang ini bersandar pada jaringan-jaringan pribadi antara *patron klien* serta penyukongnya.⁸ Oleh karena itu birokrasi yang berjalan merupakan bentuk *patrimonial*, seperti halnya pada kerajaan Jawa, raja memberikan *appanage* kepada para pendukungnya, para klient dan keluarganya.

Bentuk *appanage* baru yang kini dibagi-bagikan itu berwujud, antara lain : jabatan dalam pemerintahan, jabatan-jabatan dengan kekuasaan mengalokasikan lisensi *import* dan *ekspor*. Disamping sistem *patrimonial*, dalam masyarakat Jawa juga terdapat pembagian *cultural* antara abangan dan santri. Antara abangan dan santri sering terjadi persaingan kekuatan dalam kekuasaan. Pada mulanya kaum santri mempunyai kekuasaan tertinggi diatas kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Seperti kerajaan Giri, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ulama, mempunyai wewenang untuk melantik dan memberi gelar raja-raja Jawa, sehingga disebut dengan Paus Van Java.⁹

Kerajaan-kerajaan di Indonesia pada umumnya memiliki sistem feodal yang sama. Khususnya di Jawa, antara pemegang kekuasaan dan gejala kekuasaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang nyata. Oleh karena itu kegiatan

⁸ R.W. Liddle, *Cultural and Class Politics in New Order Indonesia*, (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1977), Catatan No. 2.

⁹ H.J. De Graaf, "Islamic State in Java 1500-1700, dalam V.K. 1, (The Haque : Martinus Nyhoff, 1976), hlm. 14-15.

politik dianggap berpusat pada si pemegang kekuasaan, dan struktur politik menggantung dalam bentuk jaringan-jaringan vertikal yang saling bersaing untuk memperoleh perlindungan pribadi dari pemegang kekuasaan¹⁰. Hal itu mempunyai kaitan erat dengan munculnya patrimonial, yaitu adanya ikatan pada sistem kesetiaan hubungan pribadi yang hirarchis dan otoriter.

Keberadaan masyarakat Jawa dapat dikatakan cukup eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa populasi paling besar merupakan masyarakat Jawa, dan dalam perkembangannya mereka mengalami persebaran dalam artian merantau hingga ke pelosok-pelosok negeri, hingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa sudah tersebar di seluruh Indonesia. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Pada akhirnya kebudayaan jawa lambat laun mulai dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Sebagai gambaran saja, pertunjukan Wayang Kulit, Musik Gamelan, Keris, merupakan salah satu identitas Kebudayaan Indonesia yang telah diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia. Sebagai suku yang mendominasi, sejarah mencatat banyak orang jawa yang mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan Negara Indonesia. Sebut saja misalnya Ir. Soekarno, K.H Ahmad Dahlan, Soeharto, R.A Kartini, Hasyim Anshari, sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak menjadi satu hal yang mengherankan, apabila kepala daerah-daerah di luar pulau jawa pun sering dijabat oleh orang-orang jawa.

¹⁰ Donald Emmerson : "Indonesia's Elite; Political Culture Ana Cultural Politics"

makalah dalam seminar Departemen Politik , Monash University, 1977, hlm. 5.

dimuat dalam majalah Indonesia, no. 31, April 1981.

Sikap mental Jawa identik dengan pandangan hidupnya, yang secara analogi mendorong terhadap sikap hidup sebagai sebuah *way of life* yang menjadi acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Sikap hidup orang Jawa dapat dilihat melalui pola-pola batiniah dalam menghadapi hidup. Sikap batin tersebut termanifestasi dalam sikap hidup orang Jawa di dalam melakukan interaksi sosial di tengah masyarakat. Unsur sentral kebudayaan Jawa adalah sikap *riila*, *nrima*, dan *sabar*. Sikap ini merupakan wawasan mental dan batin yang mendasari gerak dan langkah orang Jawa dalam segala hal. *Riila* disebut juga *eklas*, yaitu kesediaan menyerahkan segala milik, kemampuan, dan hasil karya kepada Tuhan. *Nrima*, berarti merasa puas dengan nasib dan kewajiban yang telah ada, tidak memberontak, tetapi mengucapkan terima kasih. *Sabar*, yaitu menunjukkan ketiadaan hasrat, kesabaran, dan ketiadaan nafsu yang bergolak (De S. Jong, 1976: 69).

Secara tidak langsung, sikap hidup tersebut pada akhirnya terbawa dalam sistem politik birokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia sekarang ini. Pola hubungan *patron-client* antara Raja dan kaum Priyayi, yang mengakibatkan kaum kawula/ wong cilik pada akhirnya setia sebagai penonton saja, tetap terjadi sampai sekarang. Sudah menjadi rahasia umum, jika dewasa ini birokrasi merupakan hal yang sakral bagi masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan publik. Stereotip yang tumbuh dimasyarakat adalah bahwa organisasi birokratis itu sebagai organisasi yang lamban, membosankan, rutin, rumit prosedurnya, dan buruk adaptasinya terhadap kebutuhan yang harus mereka penuhi, dan juga mengingatkan kita akan rasa frustrasi yang terus menerus dirasakan oleh para anggotanya. Mereka yang tidak tahan dengan kondisi demikian, kemudian lebih memilih untuk mengakrabkan diri dengan pejabat-pejabat birokrasi hingga pada akhirnya memberi suap. Kebiasaan itu terus mengakar hingga akhirnya muncul sebagai suatu hal yang

dapat “dimaklumi (*Nrima*)”, hingga tidak akan ada lagi yang mau mengusik kebiasaan tersebut.

Analogi sederhana, Pemerintah merupakan “Raja” , sedangkan aparatur Birokrasi, semisal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagainya , dapat dikatakan sebagai Priyayi, dan masyarakat umum adalah sebagai kawula-nya di era sekarang. Pola rekrutmen aparatur birokrasi, semisal PNS, mirip dengan apa yang terjadi di lingkungan abdi dalem seperti contoh di awal. Terdapat tahapan atau jenjang sebelum resmi diangkat sebagai PNS, ada seleksi masuk terlebih dahulu, jika lolos, maka akan ada masa Pra-jabatan sebelum kemudian resmi diangkat sebagai PNS. Disinilah terjadi Pola hubungan *Patron-Client* tersebut. Pola tersebut sebenarnya menginfiltrasi secara tidak langsung kedalam sistem politik. Sebab pola hubungan tersebut tidak secara serta merta menjadi sebuah sistem, namun melalui proses adanya kebiasaan yang dibawa oleh dominasi suku yang berada di dalam lingkungan birokrasi politik yang bersangkutan. Bisa saja, bukan pola hubungan *Patron-client* yang terjadi, namun pola hubungan lain yang dibawa oleh kebiasaan lain.

Masyarakat umum / kawula, tetap pada posisi dimana hanya harus *Rela, Sabar, dan Nrima* . Dewasa ini, ketika demokrasi merupakan tolok ukur suatu bangsa yang modern, keterlibatan masyarakat umum dalam sistem politik sedikit terakomodasi dengan adanya pemilihan umum untuk memilih “Raja” dan “Priyayi”. Namun, tetap saja , untuk keterlibatan “kawula” dalam pengambilan kebijakan publik, tetap masih sangat minim.

PENUTUP

Sistem politik pada masyarakat jawa, diakui atau tidak, pada kenyataannya memang telah menjadi patern baku sebagai gambaran dari sistem politik Indonesia saat ini. Sebagai Suku yang dominan, saat ini sistem politik suku jawa sedikit banyak telah berhasil menginfiltrasi berbagai sistem politik dari suku-

suku lain yang ada di Indonesia, walaupun dalam tingkat instansi birokrasi modern, bukan pada tingkat sistem politik adat istiadat suku yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, tidak semua tradisi dan budaya Jawa baik, selain masih adanya stratifikasi sosial, terdapat yaitu berupa kebiasaan ingin menang sendiri maupun kebiasaan yang dapat menjatuhkan harga diri. Dalam sistem politik, sikap seperti itu jelas akan merugikan, karena dapat mengancam keutuhan kelompok/asosiasi atau bahkan negara. Dari beberapa sikap hidup tersebut memang semuanya sudah melekat dan mendarah daging dan sulit untuk dapat dilepaskan, hanya orang Jawa bijak yang mampu mengendalikan sikap tersebut. Namun terdapat kepribadian orang Jawa yang perlu dicontoh sebagai suatu keistimewaan dalam melakukan kehidupan sosial dalam masyarakat, yaitu keistimewaan orang Jawa yang memiliki cita-cita luhur tentang budaya damai dan memiliki toleransi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar . 2000. *Politik Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- De S. Jong. 1976. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Donald Emmerson. 1977 “*Indonesia’s Elite; Political Culture And Cultural Politics*” makalah dalam seminar Departemen Politik, Monash University.
- H.J.De Graaf,. 1976. “*Islamic State in Java 1500-1700*”. dalam V.K. 1, The Haque : Martinus Nyhoff.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat. Edisi Paripurna*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laswell. 1972. Harold D. *Politic: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Book, Inc.
- R.W. Liddle, 1977. “*Cultural and Class Politics in New Order Indonesia*”. Singapore : Institue of Southeat Asian Studies.
- M.G Sri Wiyarti. 2008. *Sosiologi*. Surakarta : LPP UNS dan UNS Press.

Internet

- <http://sugengcido.blogspot.com/2012/01/kebudayaansukujawa.html#ixzz2Evnp0>, diakses pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 20.45 WIB.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik, diakses pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 21.20 WIB.